



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Petugas menurunkan vaksin Sinovac yang dikirim ke Dinkes Bantul, Selasa (26/1). Pemkab Bantul berencana memulai vaksinasi pada Kamis (28/1).

PROTES PTKM KE DPRD DIY

Bakul Angkringan Hingga PKL: Kami Makin Menderita

YOGYA (MERAPI)- Sejumlah Warga Pekerja Sektor Informal dan Serikat Pekerja Yogyakarta menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY, Selasa (26/1). Mereka meminta kelonggaran pelaksanaan Instruksi Gubernur tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perwakilan warga pekerja sektor informal, Denta Julian Sukma mengatakan Instruksi Gubernur No 2 tentang PTKM diperbarui Ingub No 4 tahun 2021 tentang perpanjangan PTKM hanya mengatur pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal tetapi tidak mengatur pembatasan tempat usaha secara umum.

"Kami harus menghidupi keluarga dan punya kebutuhan serta tanggungjawab lain yang harus dipenuhi. Semakin mendalam penderitaan kami. Sebenarnya sudah menderita sejak awal pandemi, tapi ini semakin mendalam. Kami kecewa dengan kebijakan Pemda DIY," paparnya.

** Bersambung ke halaman 9*

"Covid ini mau ke mana aja tak tahu tujuan, tak tahu tempat dan waktu. Ini mengapa kami pertanyakan pembatasan jam 8 malam padahal kan pagi juga ada Covid, imbuhnya.

Menurutnya, ada perbedaan pemahaman dari Instruksi Gubernur dengan implementasi di lapangan. Sehingga hal ini merugikan masyarakat pekerja sektor informal. "Ingubnya bicara hanya mal dan pusat perbelanjaan yang tutup pukul 20.00 WIB, namun semua kemudian diminta tutup jam itu. Padahal ada aturan juga 25 persen kapasitas untuk restoran dan rumah makan dengan jam yang tidak diatur, lanjutnya.

Untuk itu, para pekerja sektor informal berharap, pada PSTKM tahap 2, tidak ada lagi penindakan bagi tempat usaha di luar pusat perbelanjaan dan mal yang dipaksa tutup karena dianggap melanggar jam operasional.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan mengatakan Instruksi Gubernur hanya menyebut pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall. Dia sepakat ada perbedaan persepsi aturan dan implementasi di lapangan.

Seharusnya yang diperketat adalah protokol kesehatannya, bukan waktunya yang diperketat. Ini justru waktunya yang harus dilonggarkan agar tak memicu kerumunan. Ini seperti anak sekolah saat dapat waktu istirahat 15 menit, pasti kantin penuh, berkerumun biar dapat

makan atau minum," paparnya.

Sofyan mendorong agar penerapan kebijakan dan implementasi harus sejalan agar tidak membuat warga dengan Satpol PP berselisih paham yang justru tak menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19.

Adapun warga pekerja sektor informal dan serikat pekerja Yogyakarta yang menyampaikan aspirasi terdiri dari Paguyuban Pekerja dan Pedagang Kecil Kawasan Abu Bakar Ali, Paguyuban Pekerja dan Pedagang Lesehan Kawasan Malioboro, Paguyuban Bakul Angkringan Kawasan Malioboro, Paguyuban Pasar Klithikan Senthir, Paguyuban Pekerja dan Pedagang Kecil Kawasan Alun n Alun Utara, Paguyuban Bakul Ronde dan Angkringan Kawasan Alun n Alun Utara, Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP NIBA

SPSI) DIY serta Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Indonesia Kota Yogyakarta.

Sementara itu, Pemda DIY melaporkan penambahan 325 kasus positif Covid-19, Selasa (26/1) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 20.054 kasus. Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 54 warga Kota Yogyakarta, 41 warga Bantul, 108 warga Kulonprogo, 9

warga Gunungkidul, dan 114 warga Sleman.

"Rincian riwayat kasus terdiri dari 154 kasus periksa mandiri, 113 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 3 kasus screening karyawan kesehatan, dan 55 kasus belum ada info," jelasnya.

Sementara itu dilaporkan penambahan kasus sembuh sebanyak 311 kasus sehingga total sembuh menjadi 13.449, terdiri dari 62 warga Kota Yogyakarta, 148 warga Bantul, 43 warga Kulonprogo, 13 warga Gunungkidul, dan 45 warga Sleman.

"Adapun 6 kasus dinyatakan meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 460 kasus," imbuh Berty. Rincian kasus meninggal terdiri dari kasus 11.869 Laki-laki usia 66 tahun warga Sleman, kasus 13.427 Laki-laki usia 60 tahun warga Bantul, kasus 15.047 perempuan usia 17 tahun warga Bantul, kasus 15.766 perempuan usia 78 tahun warga Kota Yogyakarta, kasus 18.960 Laki-laki usia 56 tahun warga Bantul, dan kasus 19.195, perempuan usia 81 tahun warga Gunungkidul.

Vaksin Tiba di Bantul

Sementara itu setelah mengalami penundaan sekitar sepekan, akhirnya Kabupaten Bantul mendapat jatah vaksin Covid-19 yang dikim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Selasa (26/1).

Pengiriman vaksin menggunakan mobil boks dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Sat Brimob.

"Vaksin yang telah kami teri-

ma akan digunakan untuk 5.382 sasaran. Jumlah ini memang belum mencukupi untuk memvaksin tenaga kesehatan (nakes) yang ada di seluruh fasilitas kesehatan dengan jumlah mencapai 6.300-an nakes," ujar Kepala Dinkes Bantul, Agus Budi Raharja SKM MKes kepada wartawan di sela-sela menerima vaksin.

Selanjutnya vaksin Covid-19 yang diterima langsung disimpan di ruangan khusus di Dinkes Bantul. Setelah menerima vaksin, Dinkes Bantul akan melakukan vaksinasi perdana pada Kamis 28 Januari 2021 di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) untuk 12 tokoh masyarakat.

Para penerima vaksin antara lain dari Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul, perwakilan tokoh agama, Disdikpora Bantul dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bantul.

"Untuk pertama kali yang akan divaksin yakni pak Sekda, Dandim, Kapolres, Ibu Kajari, Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan tokoh agama dari FKUB terutama agama Islam, Katolik dan Kristen. Selain itu juga Kepala Disdikpora Bantul," lanjut Agus menegaskan.

Setelah nantinya melakukan vaksinasi kepada 12 tokoh masyarakat, Dinkes Bantul akan melanjutkan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Setelah itu barulah dilanjutkan ke masyarakat umum. (C-4/Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005